

Boyolali Terbaik Penyelesaian TLHP APIP

BOYOLALI (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menerima penghargaan sebagai kabupaten dengan kategori kinerja pengawasan terbaik kedua. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno diterima langsung Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan saat menghadiri acara Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (25/10).

Inspektur Provinsi Jateng Dhoni Widiyanto bahwa bersama dengan Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Kabupaten Boyolali keluar sebagai kabupaten terbaik dengan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Jateng. "Terima kasih sekali lagi kepada bapak ibu Inspektur Boyolali dan Cilacap sudah selesai 100 persen," ujarnya.

Sementara, Sekda Jateng Sumarno mengatakan bahwa penyelesaian TLHP APIP di Provinsi Jawa Tengah merupakan hal yang penting, karena salah satu upaya perbaikan manajemen. "Ini sangat penting karena masalah tindak lanjut ini sebetulnya upaya perbaikan manajemen. Jadi harus segera diselesaikan dan tadi sudah ditindaklanjuti dan progresnya sudah cukup baik. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih baik," jelasnya.

Ditambahkan, dia juga turut memberikan apresiasi kepada Kabupaten Boyolali atas capaian tersebut. Dia berharap agar prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. "Semoga dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa mendatang. Sekaligus memacu semangat OPD dan kabupaten/kota yang lain untuk meningkatkan kinerja maupun kinerja pengawasan," ungkapnya.

Wabup Boyolali, Wahyu Irawan mengaku bersyukur atas prestasi yang ditorehkan Kabupaten Boyolali. "Alhamdulillah Kabupaten Boyolali mendapatkan peringkat kedua penyelenggaraan pemerintah. Kami ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Jateng. Mudah-mudahan penghargaan ini dapat memicu semangat untuk meningkatkan pengawasan di pemerintahan," pungkasnya. **(Mul)-f**



Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan menerima penghargaan sebagai kabupaten dengan kategori Kinerja Pengawasan terbaik Kedua.

KR-Mulyawan

75 Tahun DPRD Purworejo, Setia Mengemban Amanah



PURWOREJO (KR) - Setia mengemban amanah menjadi tema yang diusung DPRD Kabupaten Purworejo memasuki usia yang ke-75 tahun pada 27 Oktober 2023. Jajaran legislator di Purworejo bertekad terus mengawal pembangunan daerah hingga akhir masa jabatan mereka pada tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi. "Tema itu menjadi motivasi sekaligus harapan bagi kami, bahwa di satu tahun sisa masa jabatan, harapannya tetap konsisten memperjuangkan apa yang dulu disumpahkan kepada kami," ungkapnya saat ditemui KR di ruang kerjanya, Kamis (26/10).

Dijelaskan, amanah yang diemban tersebut diwujudkan dengan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai regulasi. Legislator memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan, kebijakan

anggaran, dan membentuk peraturan daerah. Menurutnya, kinerja DPRD bersifat makro dengan capaian ada di setiap organisasi perangkat daerah. Mereka mengalokasikan program yang sebelumnya sudah digodok dan disepakati legislator dengan pemerintah. "Kami dorong capaian di masing-masing organisasi perangkat daerah. Dilihat dari progres pembangunan di daerah secara makro," tuturnya.

Dalam perannya membentuk peraturan bersama pemerintah daerah, DPRD Purworejo membentuk panitia khusus. Dalam masa sidang kali ini, katanya, terbentuk empat pansus yang membahas empat raperda. "Ada empat raperda, dua inisiatif dewan dan dua dari eksekutif," ucapnya.

Dua raperda inisiatif DPRD adalah aturan penyelenggaraan keolahragaan dan kabupaten layak anak. "Untuk yang kabupaten layak anak sudah disetujui. Ini raperda yang penting karena di sini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk menjamin hak anak," tegasnya.

Dijelaskan, jaminan atas hak anak tersebut akan diimplementasikan dalam kebijakan anggaran. Masih adanya angka stunting yang

cukup tinggi atau masih adanya anak putus sekolah Purworejo, katanya, tidak cukup diselesaikan dengan pembentukan perda. "Soal stunting misalnya, sangat rawan terjadi karena anak tentu tidak bisa memilih apa yang dimakan. Padahal stunting ini dampaknya sampai dewasa," ujarnya.

Selain berperan memastikan pembangunan daerah berjalan dengan baik, terang Dion, DPRD Purworejo juga ingin memberikan hiburan sekaligus menyiapkan ajang promosi bagi pelaku usaha kecil setempat dalam momentum peringatan hari jadi itu. Aneka kegiatan bertema promosi dan unjuk kreativitas masyarakat dalam rangkaian kegiatan peringatan ulang tahun ke-75.

Kegiatan peringatan itu dimulai dengan kegiatan Pekan Raya Purworejo. DPRD menyelenggarakan kegiatan Purworejo Bersholawat yang dihadiri puluhan ribu warga di Alun-alun Purworejo.

Selain itu, akan diselenggarakan Purworejo Creative Space yang menghadirkan penyanyi Happy Asmara. "Kami juga akan mengadakan festival kebudayaan, pameran kuliner, jalan sehat, juga nantinya ada budaya dari 16 kecamatan," tandasnya. **(Jas)-f**



PEMERINTAH
KABUPATEN
PURWOREJO



R. H. Agus Bastian, SE, MM
BUPATI PURWOREJO

SELAMAT HARI JADI KE-75 DPRD KABUPATEN PURWOREJO

27 Oktober 1948 - 27 Oktober 2023

Setia Mengemban Amanah



Hj. Yuli Hastuti, SH
WAKIL BUPATI PURWOREJO

Tanoto Foundation Didik Kepala Sekolah Inovatif

SEMARANG (KR) - Program Kepala Sekolah Inovator yang digagas Tanoto Foundation sebagai upaya meningkatkan kualitas Pendidikan dalam penerapan kurikulum merdeka oleh pemerintah disambut positif oleh sekolah-sekolah di Jateng maupun DIY.

Di Semarang hingga kini terdapat 28 SD dan SMP memanfaatkan program ini.

"Dalam program ini ada tiga pilihan program yakni perpustakaan hibrida, project penguatan profil pelajar Pancasila (P5), dan penerapan pembelajaran terdiferensiasi," ungkap Sasmoyo, Training Specialist Tanoto Foundation, di Semarang, Senin (23/10).

Sasmoyo mengatakan, program ini diharapkan bisa mendukung Kepala Sekolah untuk berinovasi sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka.

"Program ini sendiri telah dimulai pendaftarannya sejak bulan februari

lalu dan diimplementasikan hingga bulan oktober ini. Harapannya setelah adanya program ini, kepala sekolah dan guru nantinya terbiasa untuk berinovasi secara mandiri," ujarnya.

Sementara Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Semarang, Agus Sutrisno mengatakan, program Kepala Sekolah Inovator ini mendapat sambutan positif seluruh operator pendidikan di Kota Semarang.

Menurut Agus Sutrisno, akan sangat membantu Kepala Sekolah dan guru agar lebih memahami penerapan kurikulum merdeka. Disamping itu juga un-

tuk meningkatkan kepastian sekolah yang ikut program ini terhadap kurikulum merdeka menjadi lebih intens, dibandingkan yang belum mengikuti program ini.

SD Negeri 02 Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang menjadi salah satu sekolah pendampingan Tanoto Foundation kini menerapkan program untuk meringkas kasus perundangan yang ada di sekolah tersebut.

Kepala SD Negeri 02 Sendangmulyo, Dasimah mengaku menerapkan ki-at khusus yang melibatkan langsung siswa-siswi dengan memberikan

catatan terkait kasus perundangan yang dialami, atau sebagai pelaku perundangan.

Catatan tersebut dibuat dan dimasukkan ke dalam gallon untuk dimonitoring. "Cara ini akan lebih efektif untuk mengetahui akar masalah dan menentukan

cara penanganan yang tepat untuk menurunkan angka perundangan," ujar Dasimah.

Ia mencatat, tingkat keamanan di sekolahnya yang menurun dari 82,7 persen di tahun 2022, menjadi 80,68 persen di 2023. **(Cha)-f**



KR-Chandra AN

Kepala Sekolah SDN Sendangmulyo 02 Semarang, Dasimah (kiri) memaparkan program Tanoto Foundation.



KR-Istimewa

Ketua DPRD Purworejo (kiri) bersholawat bersama ulama muda Gus Ali Gondrong.

PEMERINTAH KAB. PURWOREJO KOMINFO KAB. PURWOREJO BEA CUKAI Makin Baik DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

GEMPU ROKOK ILEGAL

" BERSAMA KITA BERANTAS PEREDARAN ROKOK ILEGAL "

PELANGGARAN UNDANG-UNDANG CUKAI

	ROKOK PITA CUKAI BEKAS		ROKOK POLOS ATAU TANPA PITA CUKAI
	ROKOK PITA CUKAI PALSU		ROKOK PITA CUKAI BERBEDA

**LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL KE KANTOR BEA CUKAI
MAGELANG PADA NOMOR : 0821-3415-9933
ATAU HUBUNGI CALL CENTER NOMOR : 1500 225**